

Laporan Komite Audit

106

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Risiko & Kepatuhan, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan Komite Audit dilakukan berpedoman pada:

- a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota komite independen terhadap Direksi dan auditor ekstern. Komite melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2007 sebagai berikut:

- Ketua : Suwarsono (Wakil Komisaris Utama, Komisaris Independen)
- Anggota : Effendi (Komisaris), Alexander Zulkarnain, Teuku Radja Sjahnan, Henrajaya
- Sekretaris : Hasan Mas'ud

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris di bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal, auditor eksternal, serta laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai panduan bagi Komite Audit dan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Piagam Komite Audit terbaru telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/06/DK/2006 tanggal 18 Oktober 2006.

In line with the principles of good corporate governance, the Commissioners have created an Audit Committee, a Risk & Compliance Committee, and a Remuneration & Nominations Committee. The Audit Committee was set up under the guidance of:

- a. State Owned Enterprise Board, State Utilization, Minister;s Decree No. KEP-117/M-PBUMN/2002 Dated 1 August 2002, referring to 'Implementation of Good Corporate Governance Practices to the State

- Owned Enterprise.'
- b. The Decision Document of the Bapepam Chairman Kep-41/PM/2003 Dated 22 December 2003, concerning forming the Audit Committee Works Implementation Guidance
- c. PBI Number 8/14/2006, dated 5 October 2006, covering changes in Bank Indonesia Rules Number 8/4/2006 on Good Corporate Governance implementation for Commercial Banks.

Audit Committee has collective competency and

experience in Accounting, as well as in finance and banking. All committee members are independent to the Director and External Auditors. The Committee reports their activities to the Board of Commissioners.

Audit Committee member as of 31 December 2007, are as follows:

- Chairman: Suwarsono (Vice President Commissioner, Independent Commissioner).
- Member: Effendi (Commissioner), Alexander Zulkarnain, Teuku Radja

- Sjahnan, Henrajaya.
- Secretary: Hasan Mas'ud.

The Audit Committee is responsible for evaluating and identifying things that require special attention, as well as sharing professional ideas independently to the Commissioners, in the financial reports from Directors, Reports from internal and external auditors as well as compliance to Laws, Rules and Risk Management Implementation.

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Menurut Piagam Komite Audit, rapat dilakukan sedikitnya 1 bulan sekali. Selama 2007, telah dilakukan 36 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:

Nama/Name	Jumlah Kehadiran/Total Attendance
1. Soewarsono	32
2. Effendi	30
3. Alexander Zulkarnain	29
4. Teuku Radja Sjahnan	28
5. Henrajaya	28

Jika dipandang perlu rapat juga dihadiri oleh Komisaris, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan wakil dari auditor ekstern BNI.

Komite Audit selama tahun 2007 telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit sebagai berikut:

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

Melakukan peninjauan ulang atas draft final laporan keuangan publikasian triwulanan yaitu 31 Maret, 30 Juni dan 30 September 2007 sesuai jadwal dengan memberikan beberapa saran perbaikan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas ini, Komite Audit telah mendorong dilakukannya sertifikasi berjenjang atas laporan keuangan publikasian sejak 30 September 2006 Sampai dengan 31 Desember 2007 sebagian besar sertifikasi berjenjang telah dilaksanakan.

Berkenaan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2007, Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu didiskusikan sesuai Standar Audit Seksi 380 (PSA No. 48) perihal komunikasi dengan Komite Audit.

The Board of Commissioners has approved the Audit Committee Charter as guidance for the Audit Committee and its members in implementing the latest Audit Committee Chapter Tasks, already in Board of Commissioners Decision No. Kep/06/DK/2006 Dated 18 October 2006.

The Audit Committee holds regular meetings. According to the Audit Committee Chapter, meetings must be held a minimum of once a month. During 2007, 36 meetings were held. Recorded

attendance for each committee member is presented in the above table.

These meetings were attended by Commissioners, Directors, Division Heads, Head of Internal Control Unit and representatives from BNI external auditor.

The Committee Audit in 2007 implemented their duties according to the Audit Committee Chapter as follows:

Review of Financial Information published by the Company, such as financial

reports, projections and other financial information

A review for a final draft of quarterly published financial report (31 March, 30 June and 30 September 2007) took place on schedule. In order to augment task implementation effectiveness, Audit Committee has supported level certification from 30 September 2006 to 31 December 2007.

For the Audited Financial Report for fiscal year 2007, the Audit Committee has actively held discussions with the public accountants

and management concerning problems which need to be discussed according to Section Audit Standard 380 (PSA No. 48) with regard to communications with the Audit Committee.

Evaluation on Effectiveness of Audit Implementation from External Auditors including review on independency and objectiveness of external auditor as well as review sufficient checking to ensure all important risks receive proper attention
Based on evaluation results, the Audit Committee

Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting dipertimbangkan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2007 sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Sesuai dengan catatan atas laporan keuangan No. 52 halaman 133, diungkapkan 'Setelah pengangkatan manajemen baru diatas, manajemen baru melakukan pengkajian kembali penyisihan kerugian portofolio pinjaman yang diberikan, sebelum laporan keuangan disetujui oleh manajemen dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang signifikan atas kondisi ekonomi global.'

Dalam proses pemeriksaan akuntan publik, telah dilakukan penambahan (penyesuaian) beban sebesar Rp 1,57 triliun diantaranya untuk penambahan PPAP atas penyertaan pada BNI Multifinance dan pada BNI Securities, penambahan beban imbalan kerja dan penambahan PPAP kredit.

Akuntan publik telah menyelesaikan *review* terhadap 647 debitur korporasi dan menengah atau 52% dari populasi dengan mengusulkan tambahan PPAP sebesar Rp 400 miliar.

Pada tanggal 25 Maret 2008, manajemen melalui surat No. DIR/039/R mengajukan tambahan PPAP sebesar Rp 1,47 triliun untuk 42 debitur kelolaan Divisi Kredit Khusus dan 2 AYDA yang merupakan bagian dari 647 debitur tersebut. Dari 42 debitur dan 2 AYDA yang diajukan, KAP menerima penambahan PPAP atas 27 debitur dan 2 AYDA dengan tambahan PPAP senilai Rp 771 miliar. Meskipun penambahan PPAP tersebut sangat material, KAP tidak mempertimbangkan untuk melakukan perubahan desain sampel atas informasi tersebut.

concluded that public accountant independence and objectivity in auditing the financial report for fiscal year 2007 was conducted according to accepted auditing standards approved by the Indonesian Accountants' Association.

Notes to Financial Statement No. 52 pages 133 stated 'After appointment of new management, management conduct a review on provisioning for loan loss provided, before the approval of the Financial Statement, considering significant

uncertainty in global economic condition.'

From the review of the public accountant, additional provision expenses has been provided amounted to Rp 1.57 trillion to increase provision for BNI Multifinance and BNI Securities, provision for personnel expenses and provision for loan losses. Public Accountant reviewed 647 corporate and medium-size borrower or 52% of the total population with proposed additional provision amounted to Rp 400 billion.

In 25 March 2008, management letter No. DIR/039/R proposed additional provisioning of Rp 1.47 trillion for 42 borrower managed by Loan Recovery Division and 2 take-over asset (AYDA). Of the 42 borrower and 2 take-over asset, Public Account approved additional provisioning for 27 borrower and 2 take-over asset amounted to Rp 771 billion. Despite of its materiality, Public Accountant did not consider to change the sample design of this new information.

Terhadap kejadian tersebut, Komite Audit berpendapat bahwa penambahan PPAP atas beberapa debitur yang telah selesai di-*review* tanpa melakukan perubahan desain sampel, dapat mengurangi aspek komparabilitas. Dengan demikian, penjelasan lebih khusus dari manajemen atas kebijakan dan langkah yang dilakukan mengenai tambahan PPAP tersebut menjadi penting untuk diperhatikan.

Evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris

Kompensasi yang diberikan kepada Direksi berupa gaji dan tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, kesehatan, dan komunikasi. Sedangkan bagi Komisaris adalah gaji dan tunjangan, kendaraan, kesehatan, dan komunikasi.

Dari hasil evaluasi tersebut Komite Audit memperoleh gambaran bahwa keseluruhan pengeluaran total paket kompensasi yang dibayarkan sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 25.229.961.000 dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Gaji dan Tunjangan Salaries and Incentives	Fasilitas Lainnya Other Benefits
• Direksi/Directors	Rp 13.058.250.000	Rp 8.217.884.000
• Komisaris/Commissioners	Rp 3.408.600.000	Rp 545.227.000

Dari hasil penelitian tersebut, tidak terdapat pelanggaran yang signifikan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada Direksi dan Komisaris.

Penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.

Dari hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan, yang disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, selama tahun 2007, Perseroan telah secara

Thus, Audit Committee viewed that with regard to additional provisioning of the borrowers which have been reviewed without adjustment in design sample, could reduce comparability aspect. Therefore, management need to elaborate in more details the policies and actions with regard to the provisioning.

Evaluation for Implementation of the Commissioners' and Directors' Compensation Packages

Compensation is awarded to the Directors, such as salary and incentives,

housing accommodation, a vehicle, health coverage, and communications. That for the Commissioners includes salary and incentives, a vehicle, health coverage and communications.

From the evaluation results, the Audit Committee received the report that all disbursement of a total compensation package paid out up to December 2007 totalled Rp. 25,229,961,000, with detail in the above table.

From the review results, there is no aspect significantly

contravening the rules in implementing the compensation awarded to Directors and Commissioners.

Review of Company Compliance with Other Laws related to Company Activities.

From Audit Committee review results for the Compliance Report, delivered in the form of a Compliance Director's Duty Implementation Report, during 2007 the Company routinely delivered the report to Bank Indonesia, in line with Bank Indonesia Rule Number 1/6/PBI/1999 dated 20 September 2007, examining

rutin menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 2007. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh perseroan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan secara efektif dan efisien oleh Satuan Pengawasan Intern dan Divisi Kepatuhan (Quality Assurance) baik secara sendiri-sendiri maupun bersinergi, khususnya dalam memenuhi target program Zero Fraud.

Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan, paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SPI telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite Audit, terlepas dari hal-hal yang diungkapkan pada poin 2 di atas, kantor akuntan publik telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku

Sesuai dengan laporan audit kantor akuntan publik, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas laporan pending tindak lanjut temuan audit SPI, terdapat 1.154 temuan yang terdiri 850 temuan tahun 2007, 188 temuan tahun 2006, 99 temuan tahun 2005, 13 temuan tahun 2004, dan 4 temuan tahun 2003 yang sampai dengan Desember 2007 belum selesai ditindaklanjuti. Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan manajemen perlu diupayakan agar dapat dipercepat.

and compliance monitoring optimally carried out by the company. There is, however, still a need to increase monitoring effectively and efficiently through the Internal Monitoring Division and Compliance Division (Quality Assurance) as well as through its own synergy, especially in fulfilling program targets of Zero Fraud.

Monitori and Evaluate the Planning and Audit Implementation as well as monitore the audit result with regard to perform sufficient audit process, conducted

through evaluation of:

a. Implementation of Internal Control Team Tasks

Evaluation report concluded that SPI planning has been implemented according to audit implementation based risks, while the audit implementation and report has been carried out according to the Standard Implementation Function of Bank Internal Audit.

b. Accorded Audit Implementation by Public Accountancy to Prevailing Standards

From the monitoring and evaluation of Audit Committee, aside from the matters described in poin 2, Public Accountant conducted the audit according to Auditing Standards approved by the Indonesia Accountants Association.

c. Accorded Financial Report to Prevailing Standards

According to the public accountant office's audit report, the financial report has been delivered according to prevailing standards .

d. Follow-up Implementation by the Director for SPI-discovered Results, Public Accountancy and Bank Indonesia Monitoring Results

From the review results and evaluation for the follow-up report through an SPI audit, 1,154 were pointed out, broken down as which 850 in 2007, 188 in 2006, 99 in 2005, 13 in 2004, and 4 in 2003; by December 2007 these were not yet followed up. The Audit Committee believes that the follow-up process carried out by the

Pelaporan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memantau pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk tahun buku 2007, Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keuangan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi DPLK, Operasi Departemen Kustodian dan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007.

Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja dengan Imam Sarwoko sebagai akuntan publik.

Penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan.

Dari hasil penelaahan terhadap 7 surat pengaduan yang masuk dapat diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan, pengaduan telah ditindaklanjuti manajemen.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris

Di tahun 2007, Komite Audit memperoleh beberapa penugasan khusus oleh Komisaris, antara lain:

- Memberikan masukan pada pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Memberikan masukan mengenai *deposit agreement* kepada BNI London.
- Memberikan masukan pada audit Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).

Management still needs more effort to function speedily.

Report to Commissioners on Various Issues Faced by the Company and Risk Management Implementation by Directors.

Commissioner has formed the Risk Monitoring Committee which is responsible for evaluating and monitoring risk management implementation by Directors.

Giving Recommendations about appointments of public accountants and public accountant companies to

the Board of Commissioners for Presentation to the Shareholders General Meeting

For fiscal year 2007, a Public Accountant Election Team from the Audit Committee and a Management Deputy selected a public accountant for performing an audit for BNI consolidated financial statement, financial report of BUMN (State Owned Enterprise) Partnering Program with the Small Enterprise and community development program, a Financial Report and Pension Fund investment Portfolio Report, a Custodian Department Operations and

Performance Evaluation for the year ending 31 December 2007.

The team has made its recommendations, and the Board of Commissioners has approved the Public Accountancy Offices of Purwantono, Sarwoko, and Sandjaja, with Imam Sarwoko as the Public Accountant.

Review and Report to Commissioners on Complaints

From its review results they report that the seven complaint letters which came in have all been followed up.

Other Duties Given by the Commissioners

In 2007, the Audit Committee conducted special duties from the Commissioner, such as:

- Providing input for Company Business Plan.
- Providing input on deposit agreement for BNI London.
- Providing input on PKBL Audit.